



The Role of Pancasila Education Teachers in Instilling Civic Responsibility in Students at SMAN 1 Batukliang

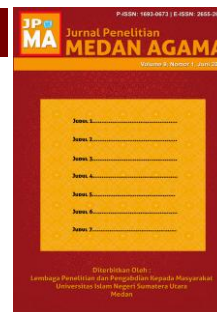
Peran Guru Pendidikan Pancasila Dalam Menanamkan Sikap Tanggung Jawab Siswa Di SMAN 1 Batukliang

Riska^{1*}, Muhammad Mabrur Haslan², Sawaludin³

^{1,2,3} Universitas Mataram; ¹riskamhrni06@gmail.com, ²mabrurm41@yahoo.com,

³sawaludin@unram.ac.id

*Correspondence: riskamhrni06@gmail.com



Abstract

This study aims to analyze the role of Civic Education teachers in instilling civic responsibility among students and to identify the supporting and inhibiting factors in the process at SMAN 1 Batukliang. The research uses a qualitative approach with a case study design. Data were collected through interviews, participant observation, and documentation involving Civic Education teachers, the principal, vice principal for student affairs, and students. Data analysis follows the Miles and Huberman model, including data reduction, display, and conclusion drawing, with data validity tested through triangulation of techniques, sources, and time. The results show that Civic Education teachers play multidimensional roles as facilitators, classroom managers, mediators, motivators, evaluators, and demonstrators in shaping civic responsibility. Supporting factors include school support, flexible curriculum policies, active teacher participation, and a positive school social environment. Inhibiting factors include students' low awareness of social responsibility, lack of family support, and limited time and innovative learning media. In conclusion, fostering civic responsibility requires a holistic approach involving continuous synergy between schools, families, and communities to develop responsible, caring, and active citizens with strong state responsibility.

Keywords: teacher's role, Civic Education, civic responsibility, character building, citizenship education.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran guru Pendidikan Pancasila dalam menanamkan sikap civic responsibility siswa serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambatnya di SMAN 1 Batukliang. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan siswa. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, serta diuji dengan triangulasi teknik, sumber, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru berperan sebagai fasilitator, pengelola kelas, mediator, motivator, evaluator, dan demonstrator dalam membentuk sikap civic responsibility. Faktor pendorong meliputi dukungan sekolah, kebijakan kurikulum yang fleksibel, partisipasi aktif guru, dan lingkungan sosial sekolah. Sedangkan hambatannya adalah rendahnya kesadaran siswa, kurangnya peran keluarga, serta keterbatasan waktu dan media pembelajaran inovatif. Kesimpulannya, penanaman civic responsibility memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan sinergi antara sekolah, keluarga dan masyarakat untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab dan aktif dengan tanggung jawab warga negara yang kuat.

Kata Kunci: peran guru, Pendidikan Pancasila, tanggung jawab, karakter, kewarganegaraan.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan Pancasila memegang peranan strategis dalam membentuk karakter dan sikap warga negara yang baik di Indonesia. Lebih dari sekadar mata pelajaran yang berisi fakta dan hafalan, Pendidikan Pancasila merupakan wahana transformatif yang bertujuan membentuk warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki nilai-nilai luhur dan tanggung jawab yang kuat terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Di tengah kompleksitas tantangan globalisasi dan dinamika perubahan sosial yang begitu pesat, peran Pendidikan Pancasila semakin signifikan dalam membekali generasi muda dengan kompas moral dan etika yang kokoh (Suryadi, 2020).

Permasalahan mendasar yang dihadapi saat ini adalah rendahnya kesadaran generasi muda akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta kurangnya kepedulian terhadap masalah sosial di lingkungan sekitar. Fenomena ini tercermin dari sikap individualistis dan apatis yang semakin menguat di kalangan siswa. Dalam konteks ini, *civic responsibility* atau tanggung jawab kewarganegaraan menjadi aspek krusial yang perlu ditanamkan melalui pendidikan. *Civic responsibility* merujuk pada kesadaran dan komitmen individu untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara, baik dalam konteks sosial, politik, maupun lingkungan (Nurdin, 2021).

Guru Pendidikan Pancasila memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai *civic responsibility* kepada siswa. Komalasari (2022) menegaskan bahwa guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing karakter yang harus mampu memfasilitasi siswa dalam mengkonstruksi makna nilai-nilai luhur Pancasila secara kontekstual dengan kehidupan mereka. Guru diharapkan tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga mengarahkan siswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari melalui pembelajaran berbasis pengalaman nyata (Sembiring, 2019).

Dalam menjalankan peran tersebut, guru Pendidikan Pancasila tidak hanya menanamkan nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga mengarahkan siswa pada penghayatan nilai moral dan etika keagamaan. Hal ini sejalan dengan sila pertama Pancasila, *Ketuhanan Yang Maha Esa*, yang menegaskan pentingnya hubungan manusia dengan Tuhan sebagai dasar perilaku moral. Guru berperan menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial sebagai bentuk nyata pengamalan nilai religius dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan Pancasila menjadi sarana integratif antara nilai-nilai kebangsaan dan nilai keagamaan, yang keduanya berperan penting dalam membentuk karakter warga negara yang beriman, bermoral, dan beretika.

Namun demikian, pengembangan *civic responsibility* di kalangan siswa menghadapi berbagai tantangan. Pratama (2021) mengidentifikasi bahwa salah satu masalah utama adalah kurangnya metode pembelajaran yang menarik dan relevan dengan kehidupan nyata siswa. Guru sering kali terbatas pada pendekatan ceramah konvensional dan belum optimal memanfaatkan media atau pendekatan interaktif yang dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap *civic responsibility*. Tantangan ini semakin kompleks dengan kecenderungan remaja yang semakin individualistis dan kurang peduli terhadap masalah sosial di sekitar mereka (Wahyuningsih, 2020).

Observasi awal yang dilakukan di SMAN 1 Batukliang pada Oktober 2024 menunjukkan berbagai permasalahan terkait pengembangan *civic responsibility* di kalangan siswa. Rendahnya kesadaran siswa tentang pentingnya tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan terlihat dari minimnya partisipasi aktif dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial atau kampanye kebersihan lingkungan. Lebih lanjut, kondisi ini juga tercermin dari perilaku siswa yang masih melanggar peraturan sekolah, seperti keterlambatan, tidak mengerjakan tugas, membolos, dan kurangnya sikap saling menghormati antar siswa.

Kondisi ini mengindikasikan perlunya kajian mendalam tentang bagaimana peran guru Pendidikan Pancasila dalam menanamkan sikap *civic responsibility* dapat dioptimalkan. Guru perlu berperan sebagai fasilitator, motivator, mediator, evaluator, dan demonstrator yang mampu mengembangkan kesadaran siswa dari yang semula individualistik menjadi pribadi yang bertanggung jawab secara sosial dan kewarganegaraan sesuai nilai-nilai Pancasila serta nilai moral dan etika keagamaan.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian menggunakan jenis studi kasus. Lokasi penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Batukliang, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah dengan subjek penelitian yaitu guru pendidikan pancasila di SMAN 1 Batukliang. Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai respons terhadap fenomena rendahnya kesadaran siswa terhadap tanggung jawab kewarganegaraan (*civic responsibility*), penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam peran guru Pendidikan Pancasila dalam menanamkan sikap tersebut di SMAN 1 Batukliang. Melalui pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Sub bab berikut akan memaparkan peran strategis guru dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter kewarganegaraan siswa, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas peran tersebut di lingkungan sekolah. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila dalam konteks pendidikan menengah. Uraian berikut akan menjelaskan temuan utama berdasarkan data yang telah dianalisis.

3.1 Peran Guru Pendidikan Pancasila Dalam Menanamkan Sikap Civic Responsibility Siswa Di SMAN 1 Batukliang

Guru berperan aktif dalam menanamkan sikap *civic responsibility* melalui pembelajaran kontekstual yang mengintegrasikan nilai-nilai kewarganegaraan ke dalam aktivitas sehari-hari siswa, baik di dalam maupun di luar kelas. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga berfungsi sebagai fasilitator, motivator, teladan, dan pembimbing dalam membentuk karakter siswa, khususnya dalam hal tanggung jawab sosial, kepedulian, dan kedisiplinan. Secara teoritis, peran ini sejalan dengan pendapat menurut Hidayat dan Kurniawan (2023) yang menyatakan bahwa guru memiliki peran ganda dalam pembentukan karakter sosial siswa, sedangkan menurut pandangan Sari dan Rahman (2024) yang menekankan pentingnya keteladanan dan konsistensi perilaku guru dalam membentuk integritas kewarganegaraan. Penelitian ini juga didukung oleh temuan Wahyuni (2021) dan Nugroho (2022) yang menunjukkan bahwa peran guru sebagai agen pembentuk nilai-nilai kebangsaan berdampak signifikan terhadap peningkatan kesadaran *civic responsibility* siswa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa guru Pendidikan Pancasila di SMAN 1 Batukliang menjalankan peran strategis sebagai agen transformasi karakter yang mampu membentuk siswa menjadi individu yang bertanggung jawab, sadar akan hak dan kewajibannya, serta memiliki kepedulian sosial sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara.

1. Peran Guru Pendidikan Pancasila Sebagai Fasilitator Dalam Menanamkan Sikap Civic Responsibility Siswa Di SMAN 1 Batukliang

Guru Pendidikan Pancasila di SMAN 1 Batukliang memainkan peran strategis dalam menanamkan sikap civic responsibility melalui pendekatan pembelajaran yang kontekstual, partisipatif, dan berbasis pengalaman nyata. Guru tidak hanya menyampaikan teori kewarganegaraan, tetapi juga memfasilitasi keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan sekolah seperti diskusi sosial, kerja bakti, proyek kelas, dan organisasi siswa. Hasil observasi dan wawancara salah satu guru pendidikan pancasila, berinisial M, menyampaikan “Kami berusaha agar pembelajaran Pancasila tidak bersifat satu arah atau sekadar hafalan. Kami beri siswa tugas-tugas yang berkaitan dengan kehidupan nyata, misalnya diskusi tentang isu-isu sosial, proyek gotong royong, atau kegiatan kelas yang menumbuhkan kepedulian. Dalam hal ini, saya sebagai guru hanya memfasilitasi, siswa yang harus terlibat aktif dan mengambil tanggung jawab dalam prosesnya.” Pernyataan diatas menunjukkan bahwa guru mendorong siswa untuk menginternalisasi nilai tanggung jawab, kepedulian sosial, gotong royong, dan kepemimpinan melalui aktivitas langsung di lingkungan sekolah. Proses pembelajaran tidak berhenti di dalam kelas, tetapi meluas ke kegiatan kolektif yang mendidik siswa menjadi warga sekolah yang sadar akan hak dan kewajibannya. Refleksi bersama yang difasilitasi guru setelah kegiatan menjadi kunci dalam memperkuat pemahaman dan sikap kewarganegaraan siswa.

Temuan ini sejalan dengan teori pembelajaran konstruktivistik yang menempatkan guru sebagai fasilitator dan hasil penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan. Hoskins dan Deakin- Crick menyatakan bahwa civic responsibility adalah kompetensi kunci dalam pendidikan demokratis, sementara Rimm-Kaufman dan Sandilos menekankan pentingnya pengalaman sosial sebagai sumber pembelajaran. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Nuryani & Gunawan (2023) juga menunjukkan bahwa keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan sosial melalui bimbingan guru berdampak positif terhadap pembentukan sikap tanggung jawab. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa guru Pendidikan Pancasila di SMAN 1 Batukliang berhasil menjalankan peran sebagai fasilitator pembelajaran nilai, yang memungkinkan siswa tidak hanya memahami Pancasila secara teoritis, tetapi juga menerapkannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari di sekolah

2. Peran Guru Pendidikan Pancasila Sebagai Pengelola Kelas Dalam Menamamkan Sikap Civic Responsibility Siswa Di SMAN 1 Batukliang

Peran guru Pendidikan Pancasila sebagai pengelola kelas di SMAN 1 Batukliang terbukti krusial dalam menanamkan sikap civic responsibility siswa. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menciptakan suasana kelas yang kolaboratif dan partisipatif melalui diskusi kelompok, proyek sosial, dan kesepakatan kelas bersama. Wawancara dan observasi menunjukkan bahwa siswa dilatih untuk bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, dan bertanggung jawab terhadap peran masing-masing dalam kelompok. Pendekatan ini menjadikan kelas sebagai ruang interaksi sosial yang mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif, kepedulian sosial, dan tanggung jawab bersama nilai-nilai inti dalam civic responsibility. Guru bertindak sebagai fasilitator dan pemimpin kelas yang menata dinamika sosial secara terarah agar siswa mengalami langsung makna menjadi warga negara yang aktif, peduli, dan demokratis.

Analisis teori Marzano (2020) menegaskan bahwa pengelolaan kelas yang efektif tidak sekadar mengontrol perilaku siswa, tetapi membangun iklim yang

mendukung pembelajaran sosial dan emosional. Begitu pula teori Jones dan Bouffard (2019), yang menyatakan bahwa kelas yang suportif dan terstruktur dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial siswa. Hal ini sejalan dengan penelitian Nuryani & Gunawan (2023) yang menunjukkan bahwa peran guru sebagai fasilitator dalam dinamika kelas mampu membentuk karakter kewarganegaraan siswa melalui pengalaman nyata dan interaksi bermakna. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa guru Pendidikan Pancasila di SMAN 1 Batukliang berhasil menjalankan perannya sebagai pengelola kelas yang tidak hanya mengatur proses pembelajaran, tetapi juga menanamkan nilai civic responsibility secara aktif dan kontekstual. Kelas menjadi laboratorium sosial tempat siswa belajar dan menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara dalam skala kecil, yang nantinya akan terbawa dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih luas.

3. Peran Guru Pendidikan Pancasila Sebagai Mediator Dalam Menanamkan Sikap Civic Responsibility Di SMAN 1 Batukliang

Peran guru Pendidikan Pancasila sebagai mediator di SMAN 1 Batukliang memainkan peran sentral dalam menanamkan nilai civic responsibility siswa. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa guru tidak hanya mengajarkan materi kewarganegaraan secara teoritis, tetapi juga menciptakan ruang dialog yang terbuka, di mana siswa belajar menyelesaikan perbedaan pendapat melalui musyawarah dan sikap saling menghargai. Dalam diskusi kelas, kerja kelompok, maupun dinamika organisasi seperti OSIS, guru berperan sebagai penengah yang membantu siswa mengelola konflik secara damai. Guru tidak langsung memihak, melainkan membimbing siswa untuk mendengarkan argumen satu sama lain dan mencari solusi bersama. Melalui pendekatan ini, siswa secara langsung mengalami pentingnya komunikasi, toleransi, dan pengambilan keputusan yang adil nilai-nilai inti dalam civic responsibility. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh salah satu guru Pendidikan Pancasila, berinisial S, pada tanggal 19 juli 2025 menyampaikan: “Sebagai guru PPKn, saya sering menjadi penengah kalau ada perbedaan pendapat dalam diskusi kelas. Saya tidak langsung memihak, tapi lebih mengarahkan mereka untuk mendengar satu sama lain dan mencari solusi bersama. Dari situ, mereka belajar bahwa jadi warga negara yang baik itu juga berarti bisa menyelesaikan perbedaan dengan cara yang bijak.”

Maka dari itu, peran guru sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antar siswa mendukung pandangan Lamb et al. (2020) tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan berbasis dialog. Akan tetapi, dibandingkan dengan penelitian Wijayanti & Kusuma (2023) yang menekankan pentingnya kebijakan sekolah, penelitian ini menegaskan bahwa dukungan keluarga dan waktu belajar justru menjadi faktor yang paling menentukan efektivitas penanaman civic responsibility. Dengan membimbing siswa menyelesaikan permasalahan secara demokratis dan reflektif, guru tidak hanya memfasilitasi pembelajaran, tetapi juga menanamkan karakter kewarganegaraan secara langsung. Kesimpulannya, guru Pendidikan Pancasila di SMAN 1 Batukliang telah berhasil menjalankan peran sebagai mediator yang mendidik siswa untuk menjadi warga sekolah yang toleran, adil, dan bertanggung jawab, sehingga nilai civic responsibility dapat berkembang tidak hanya sebagai konsep, tetapi sebagai kebiasaan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

4. Peran Guru Pendidikan Pancasila Sebagai Motivator Dalam Menanamkan Sikap Civic Responsibility Di SMAN 1 Batukliang
 Guru Pendidikan Pancasila di SMAN 1 Batukliang memiliki peran strategis sebagai motivator dalam menanamkan civic responsibility, yakni sikap tanggung jawab siswa sebagai warga negara. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa guru secara konsisten memberikan motivasi melalui pendekatan emosional, seperti pujian, penguatan positif, cerita inspiratif, serta refleksi nilai kebangsaan yang relevan dengan kehidupan siswa. Dalam berbagai kegiatan sosial sekolah seperti gotong royong, diskusi kelas, dan proyek kepedulian sosial guru memberikan dukungan moral yang membangkitkan rasa percaya diri dan kesadaran siswa akan pentingnya peran mereka dalam menciptakan lingkungan yang baik. Hal ini diperkuat oleh dokumentasi reflektif siswa yang mengindikasikan bahwa mereka merasa lebih bersemangat dan bangga saat kontribusinya dihargai. Dengan pendekatan ini, guru tidak hanya memotivasi secara verbal, tetapi juga menciptakan iklim pembelajaran yang suportif dan mendorong internalisasi nilai tanggung jawab secara alami.
 Dari sisi teori, Schunk et al. (2021) menegaskan bahwa motivasi siswa sangat dipengaruhi oleh dukungan guru dalam membangun self-efficacy dan makna personal terhadap aktivitas yang dilakukan. Ini sejalan dengan pendapat Pratama dan Suherman (2024) yang menyatakan bahwa guru dalam pendidikan kewarganegaraan harus mampu menjadikan setiap nilai yang diajarkan sebagai pengalaman bermakna bagi siswa. Dalam konteks ini, guru di SMAN 1 Batukliang tidak hanya mengajarkan pentingnya tanggung jawab sosial secara kognitif, tetapi juga membantu siswa merasakan nilai tersebut melalui pengalaman nyata yang relevan. Kesimpulannya, peran guru sebagai motivator terbukti efektif dalam menanamkan civic responsibility, karena mampu membangkitkan kesadaran internal siswa untuk bertindak sebagai warga negara yang aktif, peduli, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun di masyarakat.

5. Peran Guru Pendidikan Pancasila Sebagai Evaluator Dalam Menanamkan Sikap Civic Responsibility Di SMAN 1 Batukliang
 Peran guru Pendidikan Pancasila sebagai evaluator di SMAN 1 Batukliang sangat penting dalam menanamkan civic responsibility siswa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada 19 Juli 2025, diketahui bahwa guru tidak hanya menilai aspek kognitif siswa, melainkan juga mengamati sikap dan perilaku siswa dalam berbagai aktivitas sosial sekolah. Evaluasi dilakukan secara formatif dan reflektif melalui pengamatan saat diskusi kelas, proyek sosial, serta kegiatan gotong royong. Guru mencatat sikap kepemimpinan, kerja sama, empati, serta kemampuan menyelesaikan konflik secara damai. Setelah kegiatan, siswa diajak untuk berdiskusi dan merefleksikan proses yang mereka lalui, sehingga evaluasi tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga sarana pembelajaran karakter. Pendekatan ini mendorong siswa untuk lebih sadar terhadap proses, bukan hanya hasil. Mereka terbiasa mengevaluasi diri sendiri dan memperbaiki sikap secara bertahap, sebagaimana ditegaskan oleh salah satu guru, bahwa evaluasi bukan untuk memberi label, tetapi untuk membangun kesadaran.
 Secara teoritis, pendekatan evaluasi seperti ini sejalan dengan pendapat Widiastuti dan Priyono (2020) yang menekankan pentingnya asesmen autentik dalam pendidikan karakter, yaitu penilaian yang mencerminkan perubahan perilaku nyata dan perkembangan nilai-nilai sosial siswa. Hal ini juga diperkuat oleh Anderson dan Rodriguez (2023) yang menyatakan bahwa evaluasi dalam pendidikan kewarganegaraan harus bersifat holistik dan berkelanjutan,

melibatkan penilaian proses serta integritas moral siswa dalam kehidupan sosial. Guru SMAN 1 Batukliang telah mengimplementasikan pendekatan tersebut melalui evaluasi berbasis proses dan refleksi. Kesimpulannya, peran guru sebagai evaluator berkontribusi besar dalam menanamkan civic responsibility karena tidak hanya menilai hasil pembelajaran, tetapi juga membimbing siswa untuk mengenali, mengevaluasi, dan menginternalisasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam konteks kehidupan sehari-hari.

6. Peran Guru Pendidikan Pancasila Sebagai Demonstrator Dalam Menanamkan Sikap Civic Responsibility Di SMAN 1 Batukliang

Guru Pendidikan Pancasila menjalankan perannya sebagai demonstrator dengan memberikan teladan nyata dalam penerapan nilai-nilai civic responsibility. Guru secara konsisten menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, peduli, serta aktif dalam kegiatan sosial sekolah. Guru datang tepat waktu, menjaga kebersihan lingkungan, bersikap adil dalam penilaian, serta terlibat dalam kegiatan OSIS dan gotong royong bersama siswa. Keteladanan ini memberikan dampak langsung terhadap kesadaran siswa dalam meniru perilaku positif tersebut. Siswa mengakui bahwa melihat guru terlibat aktif membuat mereka terdorong untuk ikut berkontribusi. Dalam pembelajaran, guru juga menjadi contoh dalam praktik nilai kewarganegaraan, seperti saat memfasilitasi musyawarah atau menyelesaikan konflik secara adil, yang memperlihatkan langsung bagaimana civic responsibility diterapkan dalam kehidupan nyata.

Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa peran guru sebagai fasilitator dan demonstrator memiliki dampak kuat terhadap peningkatan kesadaran sosial siswa. Hal ini sejalan dengan teori Lickona (2021) yang menegaskan bahwa keteladanan merupakan faktor kunci dalam pendidikan karakter. Namun, berbeda dengan hasil menurut Suryadi dan Amelia (2024) yang menegaskan bahwa konsistensi antara ucapan dan tindakan guru menciptakan kredibilitas moral yang menjadi kekuatan transformatif dalam pendidikan kewarganegaraan. Dengan menunjukkan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai civic responsibility, guru tidak hanya mengajarkan konsep, tetapi juga menanamkan nilai secara kontekstual dan emosional. Kesimpulannya, guru sebagai demonstrator memainkan peran penting dalam membentuk karakter kewarganegaraan siswa. Keteladanan guru yang nyata mempercepat internalisasi nilai civic responsibility dalam diri siswa dan menjadikan mereka lebih sadar akan peran dan tanggung jawabnya sebagai warga sekolah maupun masyarakat.

3.2 Faktor Pendorong Peran Guru Pendidikan Pancasila Dalam Menanamkan Sikap Civic Responsibility Siswa Di SMAN 1 Batukliang

Terdapat tiga faktor utama yang mendorong keberhasilan guru Pendidikan Pancasila dalam menanamkan civic responsibility kepada siswa. Pertama, budaya sekolah yang mendukung seperti semangat gotong royong, keterbukaan dalam berdialog, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Kedua, kompetensi pedagogik dan kepribadian guru yang mencerminkan nilai-nilai kewarganegaraan. Ketiga, partisipasi aktif siswa dalam kegiatan sosial dan pembelajaran. Lingkungan sekolah yang positif ini memungkinkan guru menjalankan perannya sebagai pengarah, teladan, fasilitator, dan evaluator dengan lebih optimal dalam konteks pendidikan karakter. Hasil ini sejalan dengan pendapat Nugroho dan Santoso (2022) bahwa keberhasilan pembentukan karakter sangat dipengaruhi oleh sinergi budaya sekolah, kualitas guru, dan partisipasi warga sekolah. Rahmi dan Putra (2023) juga menekankan pentingnya dukungan sosial dari orang tua dan komunitas dalam memperkuat proses

pembelajaran karakter yang berkelanjutan.

Namun demikian, proses penanaman civic responsibility juga tidak lepas dari sejumlah faktor penghambat. Berdasarkan temuan lapangan, hambatan utama berasal dari kurangnya kesadaran siswa terhadap pentingnya nilai-nilai kewarganegaraan, pengaruh negatif media sosial yang memperkuat sikap individualistik, serta keterbatasan waktu pembelajaran yang membuat guru sulit menggali nilai secara lebih mendalam. Selain itu, belum semua orang tua menunjukkan keterlibatan aktif dalam mendukung pembentukan karakter anak di sekolah. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa meskipun lingkungan sekolah cukup mendukung, pengaruh eksternal dan dinamika pribadi siswa masih menjadi tantangan nyata. Hal ini sesuai dengan teori sistem ekologi pendidikan oleh Bronfenbrenner yang menegaskan bahwa pembentukan karakter dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara individu, keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial. Menurut hasil penelitian Widiastuti dan Priyono (2020), ketidakkonsistenan nilai antara lingkungan sekolah dan rumah juga dapat melemahkan efektivitas pendidikan karakter di sekolah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penanaman civic responsibility sangat bergantung pada kolaborasi lintas elemen yang saling mendukung, serta upaya strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan baik dari internal siswa maupun faktor eksternal yang lebih luas.

1. Partisipasi Aktif Guru dalam Pembelajaran Nilai Tanggung Jawab Dalam Menanamkan Sikap Civic Responsibility Siswa Di SMAN 1 Batukliang

Dukungan kepala sekolah dan kebijakan kurikulum yang fleksibel menjadi faktor pendukung utama dalam menanamkan sikap civic responsibility pada siswa. Kepala sekolah memberikan ruang kebebasan kepada guru Pendidikan Pancasila untuk merancang metode pembelajaran yang kontekstual dan sesuai karakteristik siswa, sehingga nilai-nilai tanggung jawab sosial dapat diajarkan secara efektif melalui aktivitas kelas maupun ekstrakurikuler. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Pendidikan Pancasila berinisial M, menyampaikan: "Saya berusaha menanamkan pada siswa bahwa tanggung jawab itu bukan hanya soal mengerjakan tugas sekolah, tapi juga peduli padateman, menjaga kebersihan kelas, dan ikut aktif dalam kegiatan sosial. Semua itu bagian dari menjadi warga negara yang baik." Hasil wawancara ini didukung oleh implementasi nyata seperti diskusi isu sosial, simulasi musyawarah, kerja bakti, dan kegiatan OSIS yang melibatkan siswa aktif dalam kehidupan sekolah. Teori pendidikan karakter menurut Rahmawati et al. (2021) dan Hartono & Dewi (2023) memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa lingkungan sekolah yang suportif dan kebijakan yang berpihak pada pendidikan karakter sangat berperan dalam membentuk sikap kewarganegaraan. Penelitian terdahulu juga menunjukkan pentingnya iklim sekolah yang positif dan kolaborasi guru dalam memperkuat pendidikan karakter. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung internal seperti kepemimpinan kepala sekolah dan kurikulum adaptif menjadi fondasi penting keberhasilan penanaman civic responsibility di SMAN 1 Batukliang.

Namun, penelitian juga mengungkap beberapa faktor penghambat yang masih perlu diatasi, seperti keterbatasan sarana prasarana yang belum merata dan kurang optimalnya peran orang tua dalam mendukung pendidikan karakter di rumah. Kendala ini berpotensi menghambat konsistensi penanaman nilai kewarganegaraan karena pembentukan sikap civic responsibility tidak hanya bergantung pada lingkungan sekolah saja, melainkan juga pada lingkungan keluarga dan masyarakat. Analisis teori dari Nugroho dan Santoso (2022) menegaskan bahwa keterlibatan aktif semua pihak, termasuk keluarga dan komunitas, sangat krusial untuk memperkuat internalisasi nilai civic responsibility. Penelitian terdahulu juga menyoroti pentingnya sinergi antara

sekolah dan keluarga agar pendidikan karakter dapat berlangsung menyeluruh dan berkelanjutan. Kesimpulannya, meskipun dukungan internal sekolah sangat kuat, faktor penghambat eksternal seperti keterbatasan fasilitas dan kurangnya peran serta keluarga masih menjadi tantangan yang harus diatasi untuk mencapai penanaman sikap civic responsibility secara maksimal di SMAN 1 Batukliang.

2. Peran Lingkungan Sosial Sekolah (Teman Sebaya Dan Kegiatan Ekstrakurikuler) Dalam Menanamkan Sikap Civic Responsibility Siswa Di SMAN 1 Batukliang
Partisipasi aktif guru Pendidikan Pancasila dalam proses pembelajaran yang bersifat partisipatif dan kontekstual. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi berperan sebagai fasilitator, motivator, sekaligus teladan yang membimbing siswa dalam memahami serta mengamalkan nilai-nilai tanggung jawab sosial. Pembelajaran yang dilakukan melalui diskusi kelompok, studi kasus, proyek sosial, dan refleksi nilai memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam menjalankan peran sebagai warga negara yang aktif dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Temuan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Hartini dan Yusri (2022), yang menyatakan bahwa partisipasi aktif guru dalam pembelajaran nilai berdampak langsung pada pembentukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Selain itu, Putri dan Firmansyah (2024) menegaskan bahwa pendidikan karakter yang efektif memerlukan keterlibatan guru yang konsisten dalam menciptakan ruang belajar transformatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan aktif dan keteladanan guru menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penanaman civic responsibility siswa secara holistik dan berkelanjutan.

Namun demikian, proses penanaman civic responsibility juga menghadapi sejumlah hambatan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam hal waktu pembelajaran yang terbatas, beban administratif guru yang tinggi, serta kurangnya dukungan dari sebagian orang tua yang belum memahami pentingnya pendidikan karakter. Hambatan ini dapat mengurangi efektivitas pembelajaran nilai karena siswa tidak mendapat penguatan secara konsisten di luar kelas. Secara teoritis, Nugroho dan Santoso (2022) menekankan bahwa pendidikan karakter yang berhasil harus melibatkan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa keberhasilan penanaman nilai tidak hanya bergantung pada strategi pembelajaran di sekolah, tetapi juga pada keberlanjutan penguatan nilai di lingkungan rumah dan komunitas. Oleh karena itu, meskipun guru telah menunjukkan peran aktif dalam membentuk civic responsibility siswa, keberhasilan yang optimal memerlukan dukungan sistemik dari semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan.

3. Peran Lingkungan Sosial Sekolah (Teman Sebaya dan Kegiatan Ekstrakurikuler) dalam Menanamkan Sikap Civic Responsibility Siswa di SMAN 1 Batukliang
Interaksi antar siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, Pramuka, PMR, dan aksi sosial menciptakan ruang belajar yang autentik di luar kelas, di mana siswa dapat mengalami langsung nilai-nilai seperti tanggung jawab, kepedulian sosial, kerja sama, dan kepemimpinan. Selain itu, hubungan antar teman sebaya berperan besar sebagai katalis dalam pembentukan sikap kewarganegaraan. Ketika norma positif seperti saling menghargai, aktif berpartisipasi, dan bertanggung jawab telah mengakar dalam komunitas siswa, maka nilai-nilai civic responsibility bukan lagi menjadi tuntutan dari guru, melainkan menjadi bagian dari budaya bersama. Secara teoritis, hal ini sejalan

dengan pendapat Nurhidayah et al. (2023:64) yang menyatakan bahwa lingkungan sosial yang positif mempercepat proses internalisasi nilai karena siswa cenderung menyesuaikan diri dengan norma kelompoknya. Temuan ini juga diperkuat oleh Santoso dan Wulandari (2024:88), yang menyebutkan bahwa sekolah dapat menjadi laboratorium demokrasi mikro, tempat siswa mempraktikkan nilai-nilai kewarganegaraan secara nyata melalui interaksi sosial dan partisipasi organisasi.

Dengan demikian, lingkungan sosial sekolah yang kondusif terbukti menjadi faktor determinan dalam mendukung keberhasilan penanaman civic responsibility oleh guru Pendidikan Pancasila. Keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan sosial, dukungan teman sebaya, dan kultur sekolah yang mendorong kolaborasi menciptakan sistem penguatan nilai yang berkelanjutan. Namun, apabila lingkungan sosial ini tidak dikelola dengan baik atau minim partisipasi, maka akan menjadi hambatan dalam proses internalisasi nilai karena siswa kehilangan konteks praktis dalam menerapkan pembelajaran yang mereka terima di kelas. Oleh karena itu, penguatan iklim sosial sekolah harus dilakukan secara strategis dan terencana, seiring dengan pembelajaran formal di kelas. Sinergi antara pembelajaran nilai di ruang kelas dan aktivitas sosial di luar kelas menjadi kunci keberhasilan dalam membentuk siswa yang tidak hanya memahami civic responsibility secara konseptual, tetapi juga mampu mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari secara nyata.

3.3 Faktor Penghambat dalam Menanamkan Civic Responsibility di SMAN 1 Batukliang

Proses penanaman civic responsibility di SMAN 1 Batukliang menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks. Berdasarkan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, hambatan utama bersumber dari tiga dimensi: internal siswa, lingkungan keluarga, dan sistem pembelajaran. Dari sisi internal, ditemukan bahwa beberapa siswa memiliki kesadaran rendah terhadap tanggung jawab sosial, kurang motivasi, dan belum mampu menginternalisasi nilai-nilai karakter yang diajarkan. Sikap individualistis dan rendahnya empati sosial membuat siswa cenderung pasif dalam kegiatan sosial sekolah. Hal ini sejalan dengan teori pembentukan karakter yang menyatakan bahwa faktor kepribadian dan lingkungan sangat menentukan keberhasilan internalisasi nilai (Lickona, 1991). Penelitian oleh Yuliana dan Kartika (2021) juga memperkuat temuan ini, bahwa rendahnya pemahaman siswa terhadap konsep kewarganegaraan modern menghambat keterlibatan aktif mereka dalam kehidupan sosial. Selain itu, pengaruh lingkungan keluarga juga berperan signifikan. Kurangnya dukungan dan teladan dari orang tua dalam membangun tanggung jawab sosial menyebabkan siswa tidak terbiasa untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Hal ini didukung oleh Ramadhani dan Nasution (2023), yang menekankan pentingnya sinergi antara pendidikan di rumah dan di sekolah dalam membentuk karakter siswa.

Dari aspek sistem pembelajaran, hambatan utama yang ditemukan adalah keterbatasan waktu pengajaran dan minimnya penggunaan media pembelajaran inovatif. Guru Pendidikan Pancasila di SMAN 1 Batukliang hanya memiliki dua jam pelajaran per minggu, yang dinilai tidak cukup untuk menanamkan nilai civic responsibility secara mendalam dan aplikatif. Akibatnya, guru lebih fokus pada pencapaian aspek kognitif, sementara pembentukan sikap dan perilaku siswa menjadi kurang optimal. Selain itu, keterbatasan fasilitas digital dan media pembelajaran interaktif menghambat inovasi dalam penyampaian materi kewarganegaraan. Padahal, menurut Wulandari dan Prasetyo (2021), integrasi teknologi dalam pembelajaran karakter mampu meningkatkan partisipasi siswa dan mendorong pemahaman nilai secara kontekstual. Ketiadaan media yang menarik dan relevan membuat siswa cepat bosan dan kurang

terlibat dalam pembelajaran nilai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun SMAN 1 Batukliang memiliki komitmen untuk menanamkan civic responsibility, berbagai hambatan baik dari sisi siswa, keluarga, maupun sistem pembelajaran perlu ditangani secara strategis dan kolaboratif agar pendidikan nilai dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

1. Kurangnya Kesadaran Siswa Akan Tanggung Jawab Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama dalam proses penanaman civic responsibility di SMAN 1 Batukliang adalah rendahnya kesadaran siswa akan pentingnya tanggung jawab sosial. Berdasarkan observasi pada kegiatan seperti kerja bakti mingguan dan diskusi kelompok, sebagian siswa tampak pasif, kurang antusias, bahkan menyerahkan tanggung jawabnya kepada teman sekelompok. Pernyataan guru Pendidikan Pancasila berinisial M menguatkan temuan ini, bahwa sebagian siswa belum memahami bahwa partisipasi dalam kegiatan sosial adalah bagian dari tanggung jawab sebagai warga sekolah. Dokumentasi kegiatan juga memperlihatkan ketimpangan partisipasi, di mana keterlibatan aktif lebih banyak datang dari siswa-siswa tertentu atau karena dorongan guru dan OSIS, bukan kesadaran pribadi. Temuan ini memperlihatkan bahwa banyak siswa masih memandang aktivitas sosial sebagai tugas tambahan atau kewajiban pihak lain, bukan sebagai bentuk partisipasi aktif dalam kehidupan sekolah maupun masyarakat.

Secara teoretis, rendahnya kesadaran tanggung jawab sosial berkaitan erat dengan belum terbentuknya pemahaman afektif siswa terhadap nilai-nilai kewarganegaraan. Handayani dan Supriadi (2023:89) menyatakan bahwa lemahnya keterlibatan sosial siswa sering disebabkan oleh minimnya pemahaman mengenai makna peran sosial sebagai warga negara, yang semakin diperparah oleh pengaruh budaya individualistik di kalangan remaja. Prasetyo dan Anggraeni (2024:156) menambahkan bahwa pengembangan civic responsibility memerlukan transformasi pembelajaran yang menekankan pada pengalaman emosional dan keterlibatan nyata, bukan sekadar penyampaian teori. Oleh karena itu, hambatan berupa sikap apatis dan minimnya rasa kepemilikan terhadap komunitas sekolah mencerminkan perlunya pendekatan pedagogis yang lebih menyentuh ranah afeksi dan kontekstual. Kesimpulannya, kurangnya kesadaran siswa akan tanggung jawab sosial menjadi penghambat signifikan dalam proses internalisasi nilai-nilai civic responsibility, dan hal ini menuntut strategi pembelajaran yang lebih partisipatif, reflektif, dan berbasis pengalaman nyata agar siswa mampu memahami serta menjalankan perannya secara aktif sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

2. Terbatasnya Waktu dan Media Pembelajaran yang Mendukung

Faktor keluarga menjadi salah satu penghambat utama dalam proses penanaman civic responsibility. Wawancara dengan guru menunjukkan bahwa siswa yang tidak dibiasakan bertanggung jawab di rumah cenderung membawa sikap pasif ke lingkungan sekolah. Hal ini diperkuat oleh observasi dalam kegiatan sosial dan pembelajaran kelompok, di mana beberapa siswa tampak tidak peduli terhadap tugas kolektif, enggan terlibat, dan lebih memilih menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain. Dokumentasi kegiatan juga menunjukkan bahwa siswa dengan tingkat partisipasi rendah umumnya berasal dari keluarga yang tidak aktif berkomunikasi dengan sekolah, seperti tidak hadir dalam pertemuan wali murid atau kegiatan parenting school. Minimnya dukungan dan keteladanan dari rumah membuat upaya pembentukan karakter oleh guru menjadi tidak optimal karena tidak ada kesinambungan nilai antara rumah dan sekolah.

Secara teoretis, keluarga merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter. Kurniasih dan Syarifudin (2022:73) menekankan bahwa keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama yang sangat menentukan keberhasilan pembinaan nilai tanggung jawab pada anak. Ketika keluarga tidak memberikan keteladanan, tidak melibatkan anak dalam aktivitas sosial di rumah, atau kurang menjalin komunikasi yang konstruktif dengan sekolah, maka nilai-nilai civic responsibility yang diajarkan di sekolah cenderung tidak bertahan lama. Hal ini diperkuat oleh Rahayu dan Firmansyah (2023:201), yang menyatakan bahwa ketidaksesuaian antara nilai-nilai di sekolah dan praktik di rumah dapat menimbulkan konflik internal pada siswa, sehingga menghambat pembentukan identitas kewarganegaraan yang utuh. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kurangnya peran keluarga menjadi salah satu hambatan signifikan dalam proses penanaman civic responsibility di SMAN 1 Batukliang. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan kolaborasi yang lebih intensif antara sekolah dan orang tua dalam membentuk lingkungan pendidikan yang konsisten dan saling mendukung, baik di sekolah maupun di rumah.

3. Terbatasnya Waktu dan Media Pembelajaran yang Mendukung

Keterbatasan waktu pembelajaran dan minimnya media pembelajaran yang mendukung pendekatan kontekstual. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada tanggal 21 Juli 2025, guru Pendidikan Pancasila menyampaikan bahwa waktu pembelajaran yang hanya dua jam perminggu sering kali tidak cukup untuk mengeksplorasi nilai-nilai kewarganegaraan secara mendalam. Guru berinisial M menjelaskan bahwa keterbatasan waktu tersebut menyulitkan pelaksanaan metode pembelajaran berbasis proyek, diskusi mendalam, ataupun kegiatan reflektif yang dapat menumbuhkan kesadaran sosial siswa. Selain itu, fasilitas dan media pembelajaran seperti video interaktif, modul kontekstual, atau akses ke platform digital masih terbatas. Hal ini membuat siswa kurang mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna, sehingga proses internalisasi nilai tanggung jawab sosial cenderung bersifat normatif dan belum menyentuh aspek afektif secara mendalam.

Secara teoretis, pembelajaran nilai-nilai kewarganegaraan akan lebih efektif jika dilakukan melalui pendekatan aplikatif yang mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nugraha dan Fitriani (2024:102) menyatakan bahwa pendidikan karakter membutuhkan alokasi waktu yang memadai serta media pembelajaran yang kontekstual agar siswa dapat mengembangkan kesadaran dan partisipasi sosial secara aktif. Penelitian sebelumnya oleh Sari dan Lubis (2022) juga menunjukkan bahwa keterbatasan sarana belajar dan pendekatan pembelajaran yang konvensional menjadi penghambat dalam upaya penguatan nilai civic responsibility di sekolah. Dengan demikian, meskipun guru di SMAN 1 Batukliang telah berperan aktif sebagai fasilitator dan motivator dalam pembelajaran, hambatan struktural seperti waktu dan media yang terbatas tetap menjadi kendala signifikan. Hal ini menunjukkan pentingnya dukungan dari pihak sekolah dan pemerintah dalam menyediakan sumber daya yang memadai untuk menunjang pembelajaran nilai kewarganegaraan yang efektif, holistik, dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Penanaman sikap *civic responsibility* siswa di SMAN 1 Batukliang dipengaruhi oleh peran utama guru Pendidikan Pancasila dalam enam dimensi, yaitu sebagai fasilitator, motivator, mediator, evaluator, pengelola kelas, dan demonstrator yang menanamkan nilai kewarganegaraan melalui pembelajaran berbasis nilai,

pengalaman, dan keteladanan. Proses ini berjalan dengan baik berkat faktor pendukung berupa kebijakan kurikulum yang fleksibel, partisipasi aktif guru, dan lingkungan sosial sekolah yang kondusif. Namun, masih terdapat faktor penghambat seperti rendahnya kesadaran tanggung jawab sosial siswa, minimnya peran keluarga, serta keterbatasan waktu dan fasilitas pembelajaran. Sebagai rekomendasi, diperlukan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan sinergi berkelanjutan dalam pembentukan karakter kewarganegaraan, agar siswa menjadi generasi yang cerdas, peduli, aktif berpartisipasi, dan bertanggung jawab sebagai warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alqadri, B., Kurniawansyah, E., & Fauzan, A. (2021). Habitulasi nilai-nilai karakter sebagai perilaku antikorupsi pada masyarakat Kajang. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(1).
- Anderson, R., & Rodriguez, M. (2023). *Holistic assessment in civic education: Evaluating character and competence*. Civic Learning Press.
- Handayani, R., & Supriadi, D. (2023). *Krisis kepedulian sosial remaja di era digital: Tinjauan pendidikan karakter*. Cakrawala Press.
- Hariyanto, H., Jahiban, M., & Herianto, E. (2019). Strategi guru PPKn dalam penguatan karakter siswa SMPN 2 Mataram. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v6i1.85>
- Hartini, S., & Yusri, A. (2022). Strategi pembelajaran nilai karakter melalui pendekatan kontekstual di sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan Nilai*, 20(2), 135–143.
- Hartono, B., & Dewi, M. (2023). Membangun ekosistem pendidikan karakter berbasis kultur sekolah. *Jurnal Kependidikan*, 25(3), 165–174.
- Hoskins, B., & Deakin-Crick, R. (2020). *Competences for democratic culture and civic responsibility*. Council of Europe Publishing.
- Jones, S. M., & Bouffard, S. M. (2019). *Social and emotional learning: From programs to strategies*. Harvard Education Press.
- Kurniasih, D., & Syarifudin, A. (2022). Pengaruh pola asuh orang tua terhadap pembentukan tanggung jawab sosial siswa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(1), 70–78.
- Lamb, S., Maire, Q., & Doecke, E. (2020). *Key skills for a changing world: Citizenship education and the role of the teacher*. Routledge.
- Lickona, T. (2021). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- Marzano, R. J. (2020). *The art and science of teaching: A comprehensive framework for effective instruction*. ASCD.
- Nugraha, R., & Fitriani, L. (2024). Efektivitas media pembelajaran tematik dalam pendidikan karakter. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 16(2), 100–107.
- Nurhidayah, L., Maulana, R., & Iskandar, A. (2023). Pengaruh lingkungan sosial sekolah terhadap internalisasi nilai kewarganegaraan siswa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 7(1), 60–67.
- Nuryani, & Gunawan, H. (2023). Peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran Pancasila untuk menumbuhkan civic responsibility siswa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 13(1), 76–84.
- Prasetyo, H., & Anggraeni, N. (2024). Pendidikan kewarganegaraan transformatif untuk generasi muda: Pendekatan pengalaman dan afeksi. *Jurnal Civic Education*, 9(1), 150–160.

- Pratama, A. D., & Suherman, A. (2024). Peran guru sebagai motivator dalam membentuk kesadaran nilai kewarganegaraan siswa. *Jurnal Ilmu Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 85–93.
- Putri, A. D., & Firmansyah, R. (2024). Transformasi peran guru dalam pendidikan karakter di era Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 15(1), 200–209.
- Rahayu, S., & Firmansyah, A. (2023). Disharmoni nilai keluarga dan sekolah dalam pembentukan identitas kewarganegaraan. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 21(2), 199–208.
- Rahmawati, E., Susanto, H., & Ningsih, S. (2021). Peran iklim sekolah dalam pembentukan karakter siswa. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 19(2), 100–110.
- Rimm-Kaufman, S. E., & Sandilos, L. E. (2021). *Supporting students' civic learning through constructivist teaching*. Teachers College Press.
- Santoso, B., & Wulandari, F. (2024). Lingkungan sosial sebagai media pembelajaran nilai demokrasi dan tanggung jawab. *Civic Education Journal*, 10(1), 85–93.
- Saputri, T., & Sumardi, L. (2023). Karakter disiplin mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Mataram. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 85–91.
- Sawaludin, S., & Salahudin, M. (2016). Nilai-nilai karakter bangsa dalam tradisi Tari Caci di masyarakat Manggarai Desa Golo Ndoal Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. *Civics: Pendidikan–Penelitian–Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 59–64.
- Sawaludin, S., Dahlan, D., & Haslan, M. M. (2023). Pengembangan civic skills melalui nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat Sade Desa Rembitan Lombok Tengah. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita>
- Schunk, D. H., Pintrich, P. R., & Meece, J. L. (2021). *Motivation in education: Theory, research, and applications* (5th ed.). Pearson Education.
- Suryadi, D., & Amelia, R. (2024). Keteladanan guru dalam pembelajaran kewarganegaraan: Studi pada sekolah menengah atas. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 14(2), 130–138.
- Widiastuti, R., & Priyono, H. (2020). Penilaian autentik dalam pendidikan karakter: Sebuah pendekatan evaluatif. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 12(1), 90–97.
- Wijayanti, D., & Kusuma, B. (2023). Dialogis dan mediasi dalam pembelajaran PPKn: Peran guru dalam membentuk sikap kewarganegaraan. *Civics: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 11(1), 75–82.